

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Indeks Pembangunan Manusia 2016*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Hariwijaya, 2007, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, Dua Satria Offset, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- J.E. Hosio, 2009, *Papua Barat Dalam Realitas Politik NKRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Lubis, M. Solly, 1977, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Saija, Ronald, 2015, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal dan Makalah

- Ardian Bakhtiar Rivai, “Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Oktober, 2015.
- Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama LKPP, “Sustainable Public Procurement”, *Jurnal Pengadaan*, Volume 3, 2013.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa”, Desember, 2014.
- Happy Hayati Helmi, “Sistem Noken dan Pemilihan Umu Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 1, 2014.
- Herna Yanti, Muhammad Sidik Prabowo, “Implementasi Kebijakan Afirmasi (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Jambi”, *Jurnal Lex Specialis*, 2017.
- Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law Universitas Islam Indonesia*, Volume 23, 2016.
- Jolien Grandia, “Public Procurement as a Policy Tool : Using Procurement to Reach Desired Outcome in Society”, *International Journal of Public Sector Management*, Volume 30, 2017.
- Khalid Mustafa, “Pengaturan Pengadaan Untuk Papua, Bagaimana Sebaiknya?”, *Majalah Kredibel*, edisi 5, Oktober, 2014.
- M. Trisno Hadisaputra, “Porsi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada APBN”, *Jurnal Pengadaan*, Volume 2, 2012.
- Phoebe Bolton, “Government Procurement as a Policy Tool in South Africa”, *Journal of Public Procurement*, Volume 6, 2006.
- Richo Andi Wibowo, “Embodiment Concept of Good Governance as Principle in Public Procurement”, *Jurnal Unisia*, Volume 34, 2012.
- Richo Andi Wibowo, “Masukan Untuk RUU PBJ : Mendesain Peradilan Yang Efektif Untuk Melayani Sengketa Pengadaan”, *Jurnal Pengadaan*, Volume 4, 2015.
- Richo Andi wibowo, “Preventing Maladmsitration in Indonesian Public Procurement”, *Utrecht University*, 2017.

- Riris Katharina, “Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Dalam Konteks Otonomi Khusus”, 2015.
- Sherri Torjman, “What is Policy?”, *Caledon Institute of Social Policy*, 2005.
- Sue Arrowsmith, “Horizontal Policies in Public Procurement : A Taxonomy 1”, *Journal of Public Procurement*, Volume 10, 2010.
- Tengku Riva Valentina, Andri Rusta, “Affirmative Action untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender pada Pemilu 2009”, *Jurnal Demokrasi*, 2010.
- Yulianto, “Implikasi Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Model Affirmative Action (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)”, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2011.
- Usman Pakasi, “Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua”, *Jurnal Jaffray*, 2009.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 53).
- Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198).
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

#### **E. Sumber Lainnya**

Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2010-2016 (Metode Baru)”, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/06/16/1211/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2016-metode-baru.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2017”, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/12/22/1056/persentase-penduduk-buta-huruf-menurut-kelompok-umur-2011-2017.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik, “Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2011-2017”, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2015/12/22/1054/angka-partisipasi-sekolah-aps-menurut-provinsi-2011-2017.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018.

Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2007-2017”, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2017.html>, diakses tanggal 2 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.web.id> pada tanggal 20 Mei 2018.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Agus Prabowo Usulkan Katalog Lokal untuk Papua dan Papua Barat”, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4897>, diakses tanggal 29 Oktober 2010.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Perpres 84 Percepat Pembangunan Papua”, <http://www.antaraneews.com/berita/343005/lkpp-perpres-842012-percepat-pembangunan-papua>, diakses tanggal 31 Oktober 2017.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Sejarah dan Latar Belakang”, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3>, diakses tanggal 2 Januari 2018.

Shirley C. Franklin, *Woman and Minority Procurement : Atlanta’s Approach*, diakses melalui <http://www.intracen.org/Women-and-minority-procurement-Atlantas-approach/> pada tanggal 4 Januari 2018.

Steve Beshear, *New Procurement Process for Minority Vendore*, diakses melalui <https://www.ksbdc.org/new-procurement-process-for-minority-vendors> pada tanggal 4 Januari 2018.

Tito Panggabean, “Sistem Noken dan Bigman”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/08011511/Sistem.Noken.dan.Bigman.>, diakses tanggal 27 Desember 2017.

Yoz, “LKPP Siapkan Aturan Black List Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cf3b54092c88/lkpp-siapkan-aturan-iblack-listi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> diakses tanggal 10 Juni 2018.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua tanggal 18 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Jayapura tanggal 18 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan Ketua Pokja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Jayapura tanggal 19 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan pengurus CV Haturiri tanggal 19 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tanggal 20 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja IV pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tolikara pada 20 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan pengurus CV Lamda Kreasindo tanggal 21 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya tanggal 23 Maret 2018.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Percepatan Infrastruktur pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tanggal 6 April 2018.

Hasil wawancara dengan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 6 April 2018.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya pada Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 6 April 2018.